

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan yang dijalankan DP3AP2KB Kota Bengkulu adalah peranan yang bersifat imperatif dengan menjalankan seluruh program-program dari Rencana Strategis (Renstra) DP3AP2KB Kota Bengkulu tahun 2019-2024. Peran ini diwujudkan melalui dua program utama yaitu: Program Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan Anak melalui kegiatan Advokasi dan Konseling KDRT di P2TP2A dan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak melalui kegiatan Pelatihan Untuk Pelatih (PUP) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT, Pengembangan Kota Layak Anak dan Pengembangan Forum Anak. Pelaksanaan program Rencana Strategis (Renstra) DP3AP2KB Kota Bengkulu tahun 2019-2024 merupakan bentuk peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*), karena permasalahan serta penanganan yang dilaksanakan DP3AP2KB berdasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan di mana masih terjadi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam DP3AP2KB yang berupaa adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia

di instansi penyelenggara PUG menyebabkan peran-peran para pelaksana PUG dan para *stakeholders* kurang maksimal. Selain itu belum tersedianya Rumah Aman sendiri untuk memberikan pengamanan dan perlindungan dan dapat menjaga privasi korban kekerasan terhadap perempuan. Dan yang terakhir adalah anggaran yang masih terbatas sehingga sarana dan prasarana pendukung diatas pun terbatas.

Faktor eksternal berupa Masih banyak masyarakat yang kurang memahami peraturan hukum dan melaporkan dirinya ketika menjadi korban tindak kekerasan. Selain itu dalam proses pelaporan ada banyak korban yang hanya datang melapor tapi setelah diminta melengkapi berkas – berkas untuk proses lebih lanjut korban tersebut sudah tidak kembali lagi untuk melanjutkan proses pendampingan. Dinas juga mengalami kesulitan menghadapi anak yang menjadi korban karena karakteristik anak.

B. Saran

1. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, DP3AP2KB perlu membangun komitmen bersama OPD Kota Bengkulu, Sumber Daya Manusia di instansi penyelenggara PUG dan para *stakeholders*. Hal itu dirasa sangat penting yang bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil kajian dan isu-isu penting terkait tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dibidangnya masing-masing. Adanya komitmen bersama yang dilakukan dengan perencanaan strategis dengan target

utama untuk pengambil kebijakan pada setiap instansi dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak disesuaikan dengan tingkat penalaran setiap masyarakat.

2. Perlunya Pemerintah Kota Bengkulu dalam mengalokasikan dana tambahan yang sesuai dengan kebutuhan program DP3AP2KB, agar pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa berjalan optimal seperti yang diharapkan termasuk untuk menambah tenaga SDM baru yang kompeten.
3. Perlu peran aktif masyarakat dalam menghilangkan tindak kekerasan terhadap perempuan. Perlunya himbauan agar partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan sebagai upaya Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak untuk menghindari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan pada perempuan dan anak harus dihentikan, jika masyarakat mengalami atau menemukan kasus kekerasan yang terjadi dilingkungan keluarga ataupun dilingkungan masyarakat segera laporkan. Karena jika tidak di laporkan akan berdampak bertambahnya korban kekerasan dan jika korban tidak dapat penanganan, korban kekerasan akan berlarut – larut menerima kekerasan tersebut dan mungkin akan mengalami depresi atau trauma karena kekerasan yang dialami oleh korban.
4. Melakukan sosialisasi secara terus menerus, dapat melalui media keagamaan. Dimana media keagamaan seperti pengajian/taushiah dapat menjadi sarana persuasif yang mudah masuk dalam lapisan keluarga

dalam masyarakat. Masyarakat Kota Bengkulu akan mengetahui bahwa tindak kekerasan termasuk pelanggaran hukum khususnya Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta perbuatan yang dilarang dalam agama manapun. Budaya taat terhadap kaidah hukum tentunya harus dilakukan melalui proses yang pastinya akan memerlukan waktu cukup panjang untuk mewujudkan target yang terdapat di dalam misi Walikota Bengkulu tahun 2019-2024 yang salah satunya yaitu mewujudkan masyarakat cerdas, sehat dan berakhlak mulia. Untuk mencapai target yang diharapkan, perlunya keterlibatan dari berbagai pihak. Tidak terkecuali para remaja dan pemuda di mana tempat remaja berkumpul atau berorganisasi.

